

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai Upaya Efektif Meningkatkan Kinerja Sekolah

Lin Inayah¹, Siti Halimah², Yeni Suhaeni³, Ria Restu Ramadhanty⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Nusantara

Email : i2n.inayah@gmail.com¹, sitih5h6garut@gmail.com², yenisuhaeni3@gmail.com³, riaresturahma@gmail.com⁴

Abstrak

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen yang awalnya dikembangkan oleh Amerika Serikat, disana dikenal antara lain dengan sebutan School Based Management (SBM). Indonesia mengembangkannya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pemberlakuan MBS sejalan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan memberikan otonomi pengelolaan kepada sekolah. Dalam MBS sekolah dituntut untuk bertanggung jawab optimal sesuai kewenangannya, memberikan pelayanan terbaik pada semua pihak berkepentingan internal dan eksternal berdasarkan standar yang berlaku, sehingga dapat mencapai keunggulan baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan maupun hasilnya. Sekolah diberi keleluasaan untuk profesional dalam pengelolaan, yakni menciptakan pemerataan pendidikan, partisipasi masyarakat, kepemimpinan demokratis, efisiensi anggaran, efektivitas kinerja, dan prestasi siswa.

Kata Kunci: Sekolah; Manajemen; Desentralisasi; Otonomi Sekolah ; Kualitas.

Abstract

School-Based Quality Improvement Management (SBM) is a management model that was originally developed by the United States, where it is known, among others, as School Based Management (SBM). Indonesia develops it in order to improve the quality of national education. The implementation of SBM is in line with the education decentralization policy which gives management autonomy to schools. In SBM, schools are required to be optimally responsible according to their authority, provide the best service to all internal and external stakeholders based on applicable standards, so that they can achieve excellence both in the planning and implementation processes as well as the results. Schools are given the freedom to be professional in management, namely creating equal distribution of education, community participation, democratic leadership, budget efficiency, performance effectiveness, and student achievement.

Keywords: School, Management, Desentralitation, School Otonomy, Quality

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan di Indonesia adalah bagian dari permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, pada setiap jenjang, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Sesuai Kementerian Diknas mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan signifikan disebabkan tiga faktor : 1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function tidak dilaksanakan secara konsekuen (terpusat pada input, kurang memperhatikan proses); 2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sangat tergantung pada keputusan birokrasi, kadang kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat; 3) peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim, partisipasi masyarakat selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan. (Depdiknas, 2004).

Sekolah sebagai wadah lembaga pendidikan, tentunya diharapkan dapat meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikannya. Dalam hal ini telah dilakukan upaya perbaikan, diantaranya sekarang dikembangkan reorientasi penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).

MPMBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif, melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Ada beberapa asumsi dasar mengapa MPMBS diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan. Pertama, yaitu sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan yang memposisikan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan. Kepala sekolah dituntut untuk bertanggung jawab atas seluruh komponen sekolah, dan harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik internal (peserta didik), maupun eksternal (masyarakat), pemerintah, maupun lembaga industri dan dunia kerja. Kedua, yaitu MBS dapat efektif penerapannya jika didukung oleh sistem berbagi kekuasaan (power sharing) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten /kota) dalam pengelolaan sekolah. Ketiga yaitu sekolah paling mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya, sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.¹

MPMBS merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Sebagaimana dikemukakan juga oleh Irianto, bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah memberikan kesempatan yang luas bagi stakeholders untuk turut serta atau berpartisipasi aktif dalam menentukan arah sekolah.² MPMBS adalah sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, staf) dan masyarakat (orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Pelaksanaan MPMBS adalah sebuah proses formal yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik dan masyarakat yang berada dekat dengan sekolah dalam proses pengambilan keputusan.⁴ Menurut Husni penerapan prinsip-prinsip MPMBS adalah pelimpahan tanggungjawab pada sekolah dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada dengan prinsip kemandirian, keadilan, kemitraan, keterbukaan, efisiensi dan akuntabilitas dengan memposisikan peran sekolah dalam pengambilan keputusan secara partisipatif untuk mencapai tujuan pendidikan.

Penerapan MPMBS memiliki tiga tujuan, yaitu: Pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam aspek MPMBS untuk meningkatkan mutu sekolah. Kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat setempat. Ketiga, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah untuk membantu peningkatan mutu pendidikan.⁶

Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Peran masyarakat sangatlah penting dalam membangun sekolah. Pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika tanggungjawab perencanaan hingga pelaksanaan berada ditangan masyarakat. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia, bukanlah hal yang baru. Ia telah dilaksanakan oleh yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non pemerintah dan bahkan oleh perseorangan.

Berdasarkan fakta dilapangan bahwasanya penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) belum semua bisa berjalan efektif di setiap sekolah, hal ini dikarenakan Manajemen Berbasis Sekolah ditandai dengan kurang siapnya sumber daya manusia dalam mengelolanya, sehingga tugas pokok dan fungsi kurang berjalan secara maksimal. Disamping itu juga masyarakat kurang peduli terhadap kemajuan sekolah, masyarakat menganggap tanggungjawab sekolah hanyalah tanggungjawab pemerintah. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan pemahaman bahwa inti dari MPMBS adalah pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan secara langsung semua warga sekolah. Manajemen berbasis

sekolah (MBS) adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan (Nurkholis, 2003). Kemudian menurut (Edmond, 2004) manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Hal ini berarti sekolah atau lembaga pendidikan diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangga mereka masing masing, sekolah dapat menentukan sistem mereka sendiri sesuai kebutuhan untuk meningkatkan produktifitas dan kepuasan.

Sistem MPMBS memberikan sekolah atau lembaga pendidikan wewenang untuk mengambil keputusan keputusan yang berhubungan dengan alokasi sumber sumber yang meliputi pengetahuan, teknologi, peraturan/wewenang, keuangan dan sebagainya. Tujuan utama Manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah produktifitas dan kepuasan (Voich, 1974). Tujuan dari manajemen ini seperti peningkatan mutu pendidikan/lulusannya, keuntungan/profit yang tinggi, pemenuhan kesempatan kerja, pembangunan daerah / nasional, serta tanggung jawab sosial. Tujuan-tujuan ini ditentukan berdasarkan penataan dan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman.

Keberhasilan penerapan MPMBS tersebut sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan sekolah dengan memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah, khususnya dalam memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Untuk itu, tulisan ini mengkaji, mendalami konsep dan hal-hal yang mengkait dengan faktor pendukung dan pelaksanaan program MPMBS di sekolah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang menempatkan penelitian dilakukan di perpustakaan, dengan dokumen, arsip, dan jenis dokumen lainnya sebagai bahan penelitian (Prastowo, Andi, 2012). Zed berpendapat bahwa metode kepustakawanan bukan hanya sekedar usaha membaca dan mencatat literatur atau buku seperti yang sering dipahami banyak orang selama ini (Zed, Mestika, 2008). Metode kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca, mencatat dan mengelola bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencermati karakteristik MPMBS di atas, menunjukkan bahwa MPMBS pada prinsipnya adalah sekolah mendapat otonomi luas dan bertanggung jawab dalam menggali, memanfaatkan, serta mengarahkan berbagai sumberdaya, baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karenanya MPMBS harus menjamin meningkatnya komunikasi antara pihak yang berkepentingan (stakeholders), komite sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, orangtua dan seluruh warga masyarakat, sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Dalam tulisan jurnal ini, metode yang dipakai adalah kajian pustaka, melihat beberapa referensi buku maupun beberapa tulisan di media online.

A. Tahap Implementasi MPMBS

Menurut Kemendikbud, ketika sebuah satuan pendidikan akan menerapkan MPMBS maka langkah langkah berikut yang harus ditempuh dalam implementasi MPMBS, meliputi:

1. Sosialisasi program menuju keterbukaan;
2. Melakukan evaluasi diri untuk mengidentifikasi tantangan nyata;
3. Merumuskan visi, misi dan target mutu;
4. Menyusun rencana peningkatan mutu;
5. Melaksanakan rencana peningkatan mutu;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
7. Merumuskan target mutu
 - a. Pertama, Sosialisasi Program. Bagi sekolah yang akan mengimplementasikan program MPMBS, maka perlu mensosialisasikan konsep MPMBS tersebut kepada semua unsur warga sekolah dan stakeholders yang terkait, melalui berbagai mekanisme seperti; seminar, lokakarya,

- orientasi, work shop, sarasehan, diskusi dan rapat kerja.
- b. Kedua, Melakukan Evaluasi Diri. Langkah ini adalah melakukan evaluasi diri sendiri. Dengan melakukan evaluasi diri sendiri, sekolah akan mendapatkan gambaran nyata keadaan sekolah yang sesungguhnya, hal ini sering disebut dengan istilah profil sekolah. Hal-hal yang dievaluasi meliputi kelemahan dan kekuatan tentang; (1) Prestasi sekolah yang telah dicapai selama ini; (2) Sumberdaya pendidikan yang tersedia disekolah; (3) Dukungan orang tua dan masyarakat sekitar terhadap penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Ketiga, Merumuskan Visi, Misi dan Target Mutu. Warga sekolah atau stakeholders yang terkait melakukan langkah yaitu merumuskan visi, misi dan target mutu yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah sesuatu yang ideal yang dicapai sekolah dimasa datang. Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam visi, maka sekolah perlu merumuskan misi yang ditempuh sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan kepada masyarakat. Misi adalah layanan pendidikan seperti yang diberikan kepada siswa untuk mencapai visi yang diterapkan. Berdasarkan visi dan misi sekolah yang telah diterapkan maka dirumuskan target mutu pendidikan yang dicapai oleh sekolah untuk kurun waktu tertentu.
 - d. Keempat, Menyusun Rencana Peningkatan Mutu. Rencana menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek mutu yang ingin dicapai, kegiatan kegiatan yang harus ditempuh, yang harus melaksanakan dan memperoleh dukungan dari orang tua siswa baik secara moral maupun fisik untuk melaksanakan rencana peningkatan mutu pendidikan tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana program adalah keterbukaan kepada semua pihak yang menjadi stakeholders pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian diperoleh kejelasan, berapa kemampuan sekolah dan pemerintah untuk menanggung program ini dan berapa sisanya yang harus ditanggung oleh orang tua dan masyarakat sekitarnya. Dengan keterbukaan manajemen maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumberdana untuk melaksanakan program dapat diselesaikan.
 - e. Kelima, Melaksanakan Rencana Peningkatan Mutu. Dalam melaksanakan rencana program peningkatan mutu pendidikan yang telah disetujui bersama antar sekolah, orang tua dan masyarakat, maka sekolah perlu mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan.
 - f. Keenam, Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program sekolah perlu mengadakan evaluasi pelaksanaan program baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir semester untuk mengetahui keberhasilan program secara bertahap, jika pada semesteran dinilai adanya faktor-faktor yang tidak mendukung, maka sekolah harus bisa memperbaiki pelaksanaan program peningkatan mutu pada semesteran berikutnya. Evaluasi jangka panjang dilakukan pada akhir tahun untuk mengetahui program peningkatan mutu telah mencapai target-target mutu yang ditetapkan sebelumnya, dengan evaluasi ini diketahui kelebihan dan kelemahan program untuk diperbaiki tahun berikutnya.
 - g. Ketujuh, Merumuskan Target Mutu. Berdasarkan hasil dari penilaian dapat memperbaiki kinerja program dimasa datang. Hasil penilaian dan merupakan input bagi sekolah dan orang tua untuk merumuskan target mutu di tahun depan. Jika dianggap berhasil target mutu dapat ditingkatkan dan jika tidak berhasil target mutu tetap seperti semula, namun dilakukan perbaikan strategi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan program. Namun bisa saja terjadi target mutu diturunkan karena dianggap terlalu berat atau tidak sepadan dengan sumberdaya pendidikan (tenaga, sarana prasarana dan anggaran) yang tersedia.

B. Strategi Pelaksanaan MPMBS

Reformasi manajemen pendidikan didunia sekolah / lembaga pendidikan, dengan menggunakan pendekatan model MPMBS merupakan tuntutan yang mendesak, kompleksitas masa depan pendidikan dituntut harus makin bermutu dan berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat. Sementara ini sekolah ditempatkan pada posisi subordinasi, karena hampir semua operasional pendidikan ditentukan oleh pendekatan birokratis secara struktural, top down, sehingga tenaga pengelola kependidikan

menjadi kaku dan terpaku kepada aturan dan kebijakan pemerintah daerah/ nasional yang ada.

Upaya mengatasi kekakuan tersebut, maka MPMBS merupakan satu alternatif pemecahan terhadap permasalahan di sekolah. Dengan MPMBS sekolah diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan sebagai wujud akuntabilitas publik. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan MPMBS, diantaranya:

1. Tingkat ekonomi masyarakat, sosial budaya, politik dan taraf pendidikan masyarakat;
2. Kebijakan pemerintah, organisasi/kepemimpinan kepala sekolah;
3. Manajemen PBM di kelas;
4. Administrasi sekolah;
5. SDM profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;

Hal tersebut merupakan komponen atau aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks persekolahan yang berdasarkan MPMBS.

Ada 6 (enam) persyaratan yang perlu dipenuhi dalam strategi pelaksanaan implementasi MPMBS di sekolah, agar berhasil baik dan mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu

- a. Rekrutmen kepala sekolah dan guru professional;
- b. Bentuk partisipasi dasar orang tua siswa;
- c. Motivasi / kemauan dasar orang tua siswa;
- d. Kemampuan mengalokasikan dana/keuangan sekolah;
- e. Kualitas KBM, hasil lulusan dan outcome;
- f. Keterlibatan semua stakeholders pendidikan.

C. Alasan Program MPMBS di Sekolah

Implementasi MPMBS dilaksanakan di lembaga atau satuan pendidikan dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Supaya sekolah mengetahui posisi atau kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya, sehingga ia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya;
2. Supaya sekolah dapat mengetahui tingkat kebutuhan lembaganya, khususnya masukan pendidikan yang dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa;
3. Supaya keputusan yang dilakukan sekolah lebih dapat memenuhi kebutuhan sekolah;
4. Supaya penggunaan sumber daya pendidikan dapat secara efektif dan efisien jika dilakukan kontrol oleh masyarakat;
5. Keterlibatan dewan sekolah dalam pengambilan keputusan dapat menumbuhkan budaya transparansi dalam pengelolaan dana atau biaya pendidikan dan menumbuhkan sikap demokratis;
6. Supaya sekolah bertanggungjawab secara langsung dalam mempertanggungjawabkan mutu pendidikan kepada stakeholders;
7. Supaya sekolah memiliki daya saing atau kompetitif diantara sekolah yang ada secara sehat dan terbuka, dalam hal inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan;
8. Supaya sekolah lebih cepat merespon terhadap kebutuhan atau aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan perkembangan zaman.

D. Langkah Strategi Implementasi MPMBS di Sekolah

Manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spirituatik keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa dan negara (Umaedi, 1999). Menurut Sagala (2010) proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Tahap pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah :

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah ketika sebuah organisasi / lembaga menetapkan tujuan yang diinginkan dan

menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum MPMBS dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan perencanaan mengenai sistem dari MPMBS itu sendiri agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Perencanaan berupa menetapkan tujuan, kegiatan, sumber daya, waktu, tempat kegiatan, POS penyelenggaraan kegiatan.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kegiatan kecil pada tiap-tiap anggota sesuai standar dan keahlian masing-masing. Dalam pelaksanaannya sistem MPMBS melibatkan seluruh pihak untuk ikut berpartisipasi dalam proses berjalannya sistem jadi tiap-tiap pihak akan mendapatkan tugas masing-masing sesuai dengan bidang mereka.

3. Directing (Pengarahan)

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Disinilah pemimpin berperan besar dimana ia akan mengarahkan tiap-tiap anggota yang telah mendapat tugas dan bagian masing-masing sesuai dengan perencanaan. Dalam proses pengarahan dilakukan juga pengawasan terhadap proses agar tetap berjalan sesuai dengan perencanaan, dengan begini efektivitas dan efisiensi kinerja akan optimal.

4. Pengawasan (Controlling)

Dalam pengawasan ada hal yang perlu dikerjakan yakni untuk memvalidasi apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, untuk itu yang perlu dinilai :

- a. Rasio standar yang ditetapkan dengan hasil pekerjaan
- b. Objektif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
- c. Selama kegiatan ada pemantauan, supervisi
- d. Pemantauan ada yang dilakukan oleh komite sekolah
- e. Sekolah melakukan evaluasi proses pembelajaran persemester dan program kerja pertahun.

E. Pengelolaan Komponen MPMBS di Sekolah

Apa saja komponen disekolah yang harus diolah terkait dengan penerapan MPMBS, berikut adalah komponen komponennya ;

1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran. Terdiri dari : Implementasi Kurikulum, Penyusunan kalender Pendidikan, Pembagian Tugas mengajar, Proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan Penilaian, analisis tindak lanjut, supervisi. Penyusunan Peraturan akademik, penentuan beban belajar, pemilihan strategis pembelajaran PAIKEM, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan.
2. Manajemen Peserta Didik. Terdiri dari : Pendataan calon peserta didik, penerimaan Peserta Didik Baru, Pengenalan sekolah/MPLS, Pengelompokan peserta didik, Pembinaan kedisiplinan, penyelenggaraan layanan khusus, pengawasan, evaluasi serta pelaporan.
3. Manajemen PTK (Pendidikan dan Tenaga Kependidikan). Terdiri dari : Perencanaan kebutuhan, Rekrutmen pengadaan, pembinaan dan pengembangan, pemnerian motivasi, Mutasi / rotasi kerja, Pemberhentian, Pengawasan, evaluasi serta pelaporan.
4. Manajemen Sarana Prasarana. Terdiri dari : analisis kebutuhan dan perencanaan, Pengadaan, Inventarisir, Pendistribusian dan pemanfaatan, pemeliharaan, Penghapusan dan Pengawasan Evaluasi dan pelaporan
5. Manajemen Pembiayaan . Terdiri dari : Penyusunan RKS, RKJM, RKT, RKAS, Penggalan sumber sumber, Pembukuan, Penggunaan sesuai peraturan perundangan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
6. Manajemen Humas. Terdiri dari : Analisis Kebutuhan, penyusunan Program, Pembagian tugas pelaksana, pelaksanaan kegiatan dan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Manajemen Budaya dan Lingkungan . Terdiri dari : Perencanaan program, sosialisasi program, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa implementasi

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) berpengaruh dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Ini berarti jika azas otonomi, kewenangan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, pemerataan, keadilan secara berkelanjutan diterapkan dengan benar di sekolah pada pengelolaannya.

MPMBS adalah sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi berupa kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, memberikan keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, staf) dan masyarakat (orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, pengusaha), dalam meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara operasional MPMBS merupakan keseluruhan proses pendayagunaan komponen pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diupayakan sendiri oleh kepala sekolah bersama semua pihak yang terkait atau berkepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Komponen ini mencakup : manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen kesiswaan, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen humas, manajemen budaya dan lingkungan. Artinya komponen ini dikelola sendiri, dirancang sendiri, diorganisir sendiri, diarahkan sendiri dan dikontrol/dievaluasi sendiri oleh semua pihak terkait.

Dengan menerapkan proses manajemen MPMBS maka rencana pencapaian mutu akan mudah tercapai karena setiap perencanaan program yang dibuat menerapkan 5 W dan 1 H, tujuan program jelas. Dalam pengorganisasian penekanan pada kejelasan tugas dan wewenang penanggungjawab program, kesatuan perintah, semua unit memahami program yang sedang dijalankan. Dalam pengarahan kegiatan, selama proses berlangsung, selalu mencocokkan antara perencanaan dengan proses yang sedang dijalankan, sehingga jika ada kekurangan atau kesalahan, secara dini bisa terdeteksi dan diperbaiki, kemudian selama proses selalu dimotivasi, disupervisi dan dipantau. Penilaian menggunakan standar pengukuran yang telah ditetapkan, dan merujuk pada SOP yang telah dibuat. Dalam tahap pengawasan / controlling penekanan pada pengukuran rasio antara hasil pekerjaan dengan standar yang ditetapkan, sikap tanggungjawab pada pekerjaan, sekolah rutin melakukan evaluasi pembelajaran persemester dan evaluasi program kerja pertahun. Kelebihan penerapan MPMBS di sekolah dalam hal pengawasan adalah setiap unit penanggungjawab manajemen dalam melaksanakan programnya, diakhir kegiatan selalu ada monitoring dan evaluasi, sehingga bisa langsung di evaluasi bersama terhadap sasaran programnya, ketercapaian programnya, jika ada kekurangan maka bisa langsung diperbaiki, sehingga sasaran mutu akan mudah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Umiarso., & Gojali Imam. Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan. (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), h.80
- Ermi Sola, Penguatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) Melalui Implementasi Kurikulum 2013, (Jurnal Idaarah, Vol. I, No. 1, Juni 2017), h. 1-13
- Depdiknas. 2004. Manajemen Berbasis Sekolah. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2004)
- Asmawi. Peran Komite Sekolah Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan Di SMKN 2 Arga Makmur. 2005
- Zulhendri. Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMAN 5 Kota Bengkulu. 2005
- Rustam. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pada SMPN 1 Kepahiang Kabupaten Kepahiang. 2005
- Rekapitulasi Hasil Ujian Nasional (UN) <http://puspendik.kemendikbud.go.id>
- Azyumardi. Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah. Makalah yang disampaikan pada konferensi Nasional Manajemen Pendidikan Yang Dilaksanakan di Hotel Indonesia Jakarta pada Tanggal 8 s.d 10 Agustus 2002, h. 6-7
- Bahrul Hayat, Kumpulan Pidato, sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, (Jakarta:2013), h.199
- Udoji. C.J.O. The African public servant as a public policy maker. Public Policy in Africa, African Association for Public Administration and Management, 1981,
- Ahmady, Arifin, Zainal. 1995. Reformasi Administrasi dalam Pendidikan Beberapa Pelajaran tentang Implementasi Kebijakan. Pidato disampaikan pada Pengukuhan Jagatan Guru Besar dalam Ilmu

Administrasi, Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Tanggal 13 Mei 1995, h. 4
Fattah, Nanang, dkk. Manajemen Berbasis Sekolah, Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta, 2003, h. 116
Depag RI., Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 2004), h. 13
Dornself, Alan. Pocket Guide to School-Based Management, (Alexandria: Virginia ASCD, 1996), h. 3
Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 13
Depdiknas. Manajemen Berbasis Sekolah. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2004), h. 3
Depag RI., Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 2004), h. 15-17